



LAPORAN KINERJA 2023



BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



www.bpmkaltim.kemdikbud.go.id



[bpmpprovkaltim](#)



BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Secara umum telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2023. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja pada tahun 2023.

Samarinda, 31 Januari 2024

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd.

NIP. 197002011997021001

DAFTAR ISI

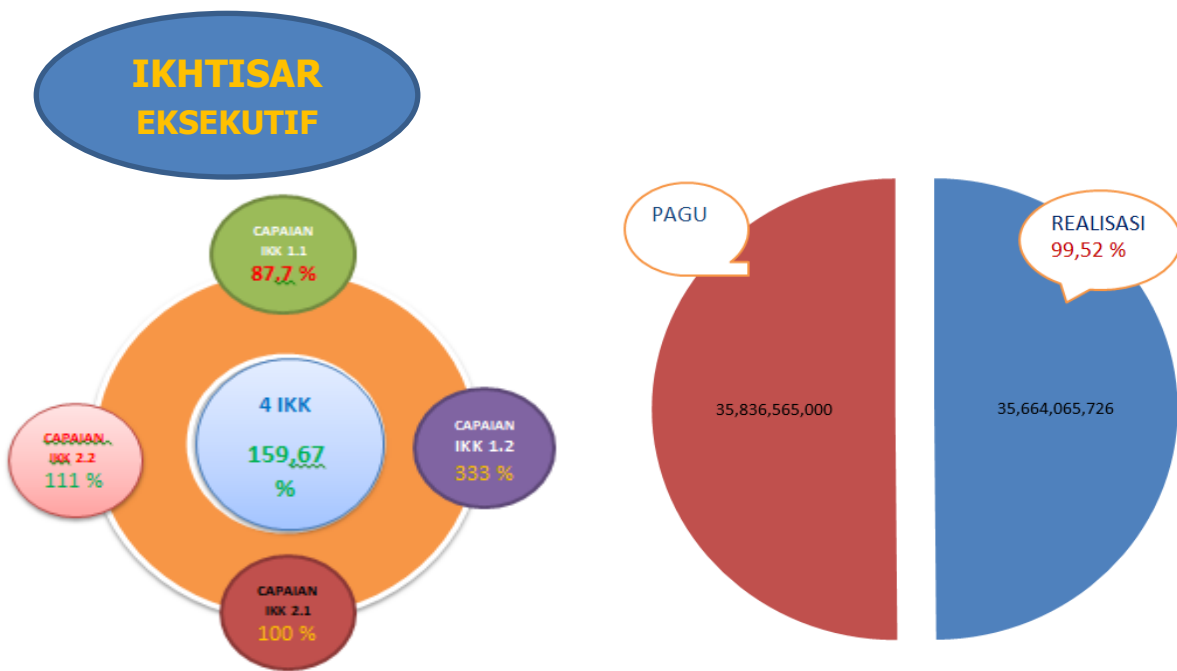
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	5
BAB II Perencanaan Kinerja	6
A. Visi Satuan Kerja.....	6
B. Misi Satuan Kerja	6
C. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan	6
D. Program Prioritas.....	9
E. Strategi Pencapaian Program Prioritas.....	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
1. Sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	14
2. Sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	22
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV Penutup	33

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Revisi /Akhir Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- Capaian Kinerja Sasaran (Output) Tahun 2023
- Pernyataan Telah Direviu
-

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:



SK 1. Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas

1.1 Persentase satuan pendidikan PAUD, Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya.

TARGET 1,96 REALISASI 1,7 CAPAIAN

1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

TARGET 30 REALISASI 100 CAPAIAN 333 %

2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur

2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur

TARGET A REALISASI A CAPAIAN 100 %

2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL

TARGET 84 REALISASI 93,58 CAPAIAN 111 %

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen.

1.1. Indikator kinerja Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.

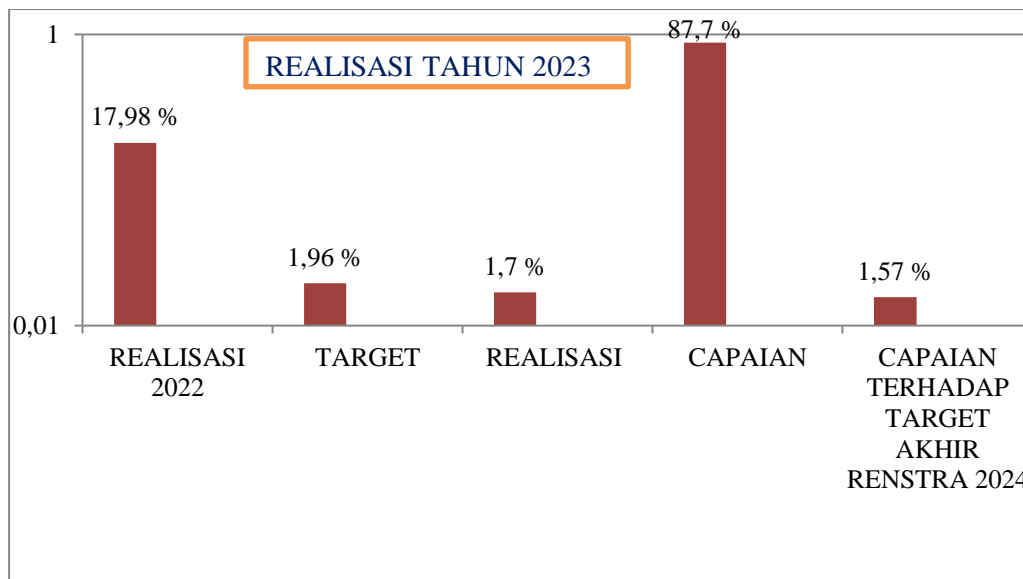
Adapun hasil mutu pembelajaran PAUD berdasarkan hasil akreditasi satuan pendidikan sebagai berikut:

REALISASI 2021	TAHUN 2022			TARGET RENSTRA 2023	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2024 (%)
	TARGET PK (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		
12,73	0,98	17,98	5,25	0,98	1.57 %

REALISASI 2022	TAHUN 2023			TARGET RENSTRA 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2024 (%)
	TARGET PK (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		
17,98 %	1.96	1,7	87,7	100	1,57 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 hasil mutu pembelajaran PAUD yang bersumber dari data akreditasi sekolah diperoleh capaian sebesar 17,98 % sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 1,7 %. Jadi persentase peningkatan mutu pembelajaran PAUD di Provinsi Kalimantan Timur diperoleh capaian 87,7 %. Hasil ini berada di BAWAH dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan proses penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 SNP yang diterapkan di satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan terhadap peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

Jika capaian ini diperbandingkan dengan target akhir renstra 2024 diperoleh peningkatan hasil sebesar 1.57 %. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni 3.92 %. Adapun grafik capaian dari indikator ini sebagai berikut:

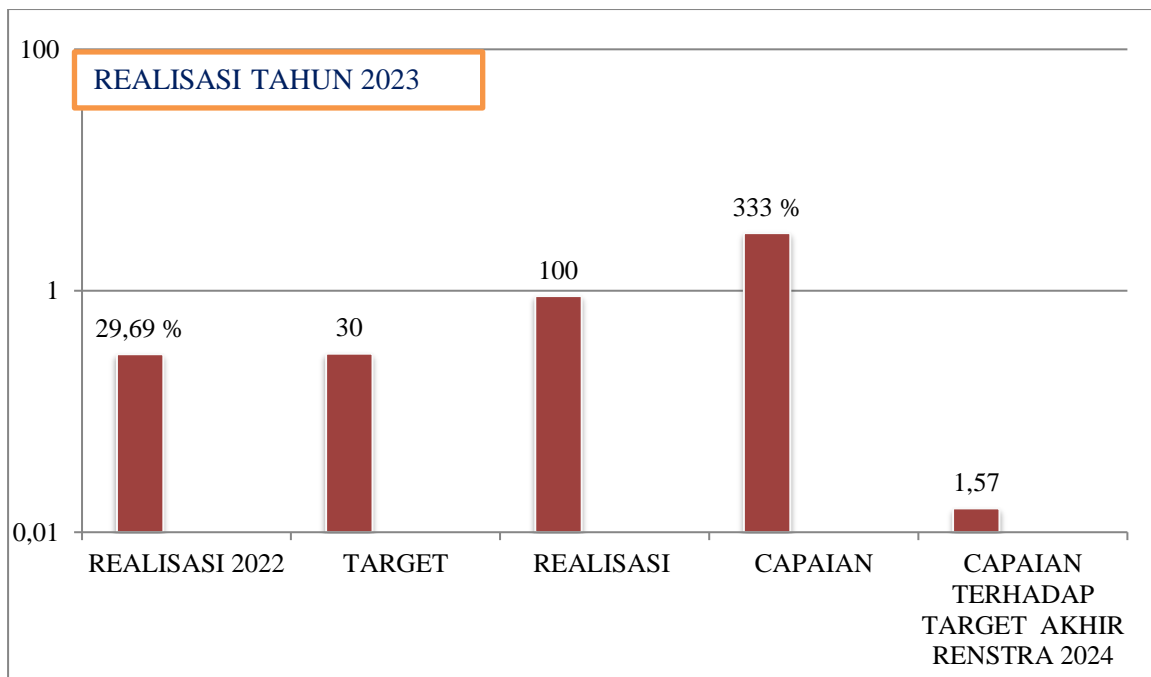


1.2. Indikator Kinerja Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Ketercapaian indikator 1.2 ini, diperoleh dari hasil akreditasi sekolah karena peningkatan rapor pendidikan dan mutu pendidikan disamping dapat diukur melalui assesmen nasional juga dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah. Hasil peningkatan mutu pendidikan/peningkatan rapor pendidikan ini diperoleh dari pusat (BAN S/M melalui Ditjen Paud Dikdasmen). Adapun hasil dari peningkatan rapor pendidikan yang bersumber dari data akreditasi sekolah sebagai berikut:

REALISASI (%) 2022	TAHUN 2023			TARGET RENSTRA 2023	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2024 (%)
	TARGET PK (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		
29,69	30	100	333	30	1.57 %

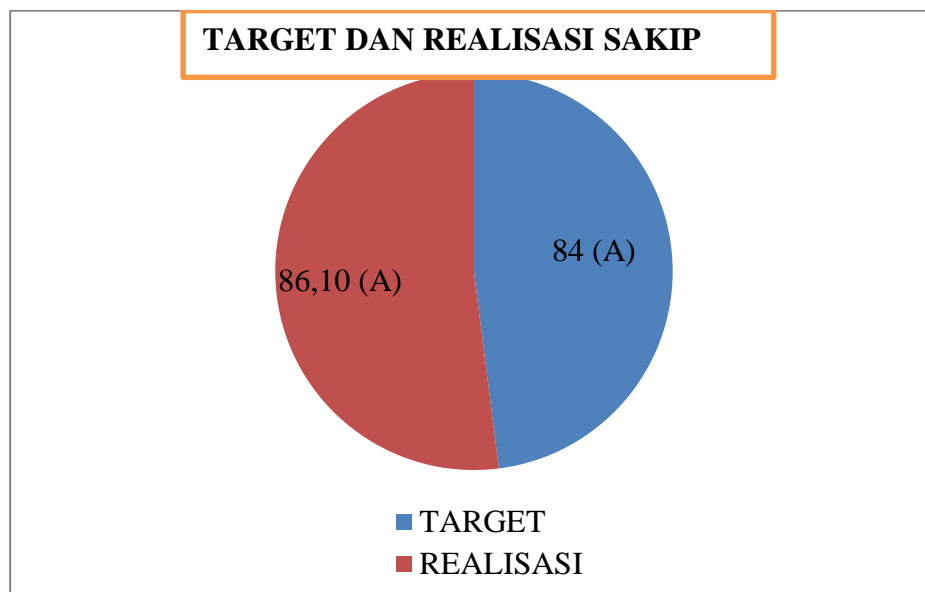
Berdasarkan data di atas, target kinerja indikator kinerja 1.2 tahun 2023 adalah 30% dimana pada tahun 2022 terealisasi 29.69% sedangkan pada tahun 2023 ini terealisasi 100 %. Persentase capaian kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya adalah sebesar 333% terdiri atas 10 kabupaten/kota dan 1 Provinsi dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan capaian terhadap target akhir renstra juga mengalami kenaikan sebesar 303,37%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan adanya kenaikan Rapor Pendidikan kabupaten/kota/prov. Pengukuran ini didapat dari Hasil Asesmen Nasional yang dituangkan dalam Rapor Pendidikan.



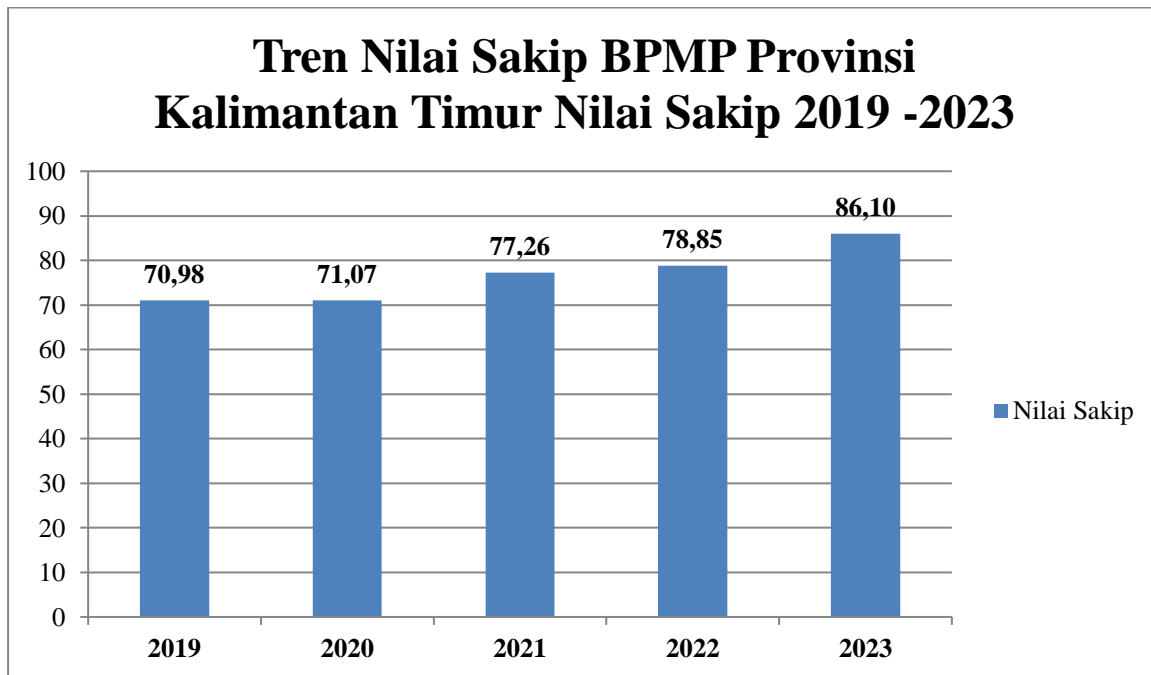
2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur

2.1. Indikator kinerja Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Target dan Realisasi nilai sakip BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2023:



Tren nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun:



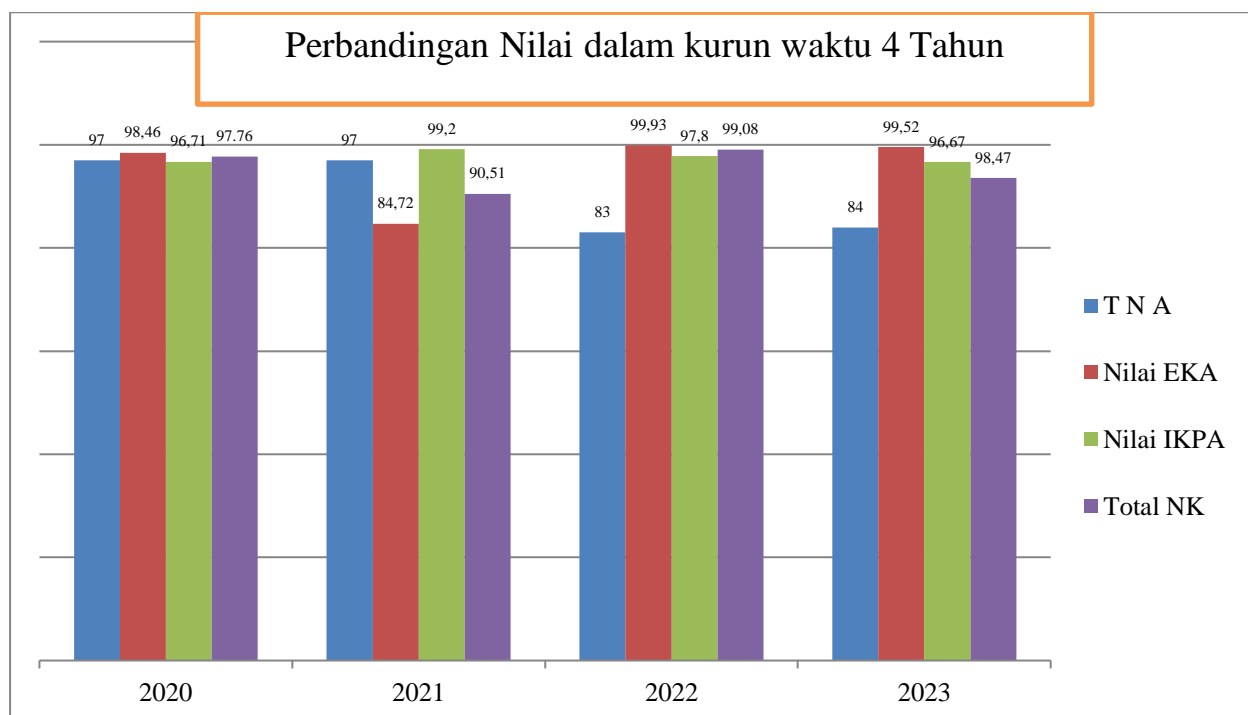
2.2. Indikator kinerja Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Berikut disajikan tabel Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik
2022	83	99.93	97.80	99.08	Sangat Baik
2023	84	99.52	96.67	98.47	Sangat Baik

Sumber: Aplikasi Spasikita(simproka)

Adapun grafik Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2020 dan 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut:



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain

- 1** Sistem informasi capaian rapor pendidikan satuan pendidikan dan rapor pendidikan kabupaten/kota tidak dapat diakses oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur, sehingga BPMP Provinsi Kalimantan Timur mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dan advokasi ke kabupaten/kota.
- 2** Hasil assessmen nasional tahun 2023 belum dapat diakses, sehingga indikator kinerja sulit diukur ketercapaiannya karena belum ada angka pembandingnya.
- 3** Hambatan dalam pencapaian target perjanjian kinerja adalah adanya keterbatasan SDM BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan SAKIP di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:

1. Koordinasi secara eksternal dengan pusat yakni bagian evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen, untuk mendapatkan data hasil mutu pembelajaran PAUD dan persentase kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya dari Badan Akreditasi Nasional.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ANBK dan pelaksanaan Perencanaan berbasis data di satuan pendidikan serta melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/dinas kabupaten/kota dalam upaya peningkatan rapor pendidikan satuan pendidikan, kabupaten/kota dan Provinsi.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ANBK dan pelaksanaan Perencanaan berbasis data di satuan pendidikan serta melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/dinas kabupaten/kota dalam upaya peningkatan rapor pendidikan satuan pendidikan, kabupaten/kota dan Provinsi.

4. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah menambah SDM SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur baik kualitas maupun kuantitas, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP, serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program dan anggaran dalam bentuk evaluasi program dan pemantauan realisasi anggaran atas capaian program untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali dibentuk pada tanggal 2 Mei 1991 dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) melalui SK Mendikbud Nomor 0240a/O/1991. Tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru di provinsi bertanggung jawab langsung pada Direktorat Tenaga Kependidikan yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional memunculkan peraturan dan kebijakan untuk merefungsionalisasi dan merestrukturisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang tertuang pada SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas sebagai penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Sesuai Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 disebutkan bahwa LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan direfungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pada tahun 2010 LPMP Kalimantan Timur berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP). Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa

LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sumber Daya Manusia (SDM) BPMP Provinsi Kalimantan Timur



Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Kalimantan Timur telah berubah nama menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd. dengan jumlah SDM sebanyak 66 PNS. Berikut struktur organisasi dan susunan kelompok kerja pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur melingkupi:

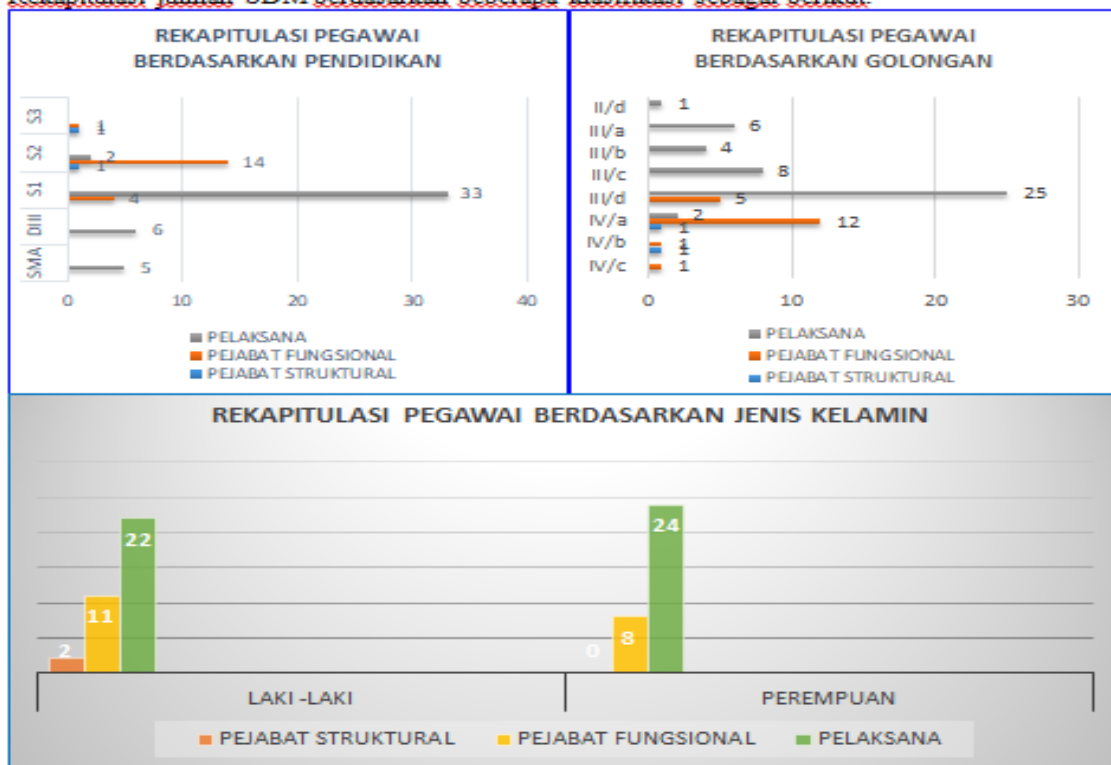


(gambar struktur organisasi)



(gambar susunankelompok kerja)

Rekapitulasi jumlah SDM berdasarkan beberapa klasifikasi sebagai berikut:



(Data bulan Desember 2023)

Adapun wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melingkupi 3 Kota dan 7 Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25,656 km² yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, Selatan, Barat, Tengah dan Negara Malaysia. Adapun Kabupaten/Kota meliputi: 1. Kota Samarinda, 2. Kota Balikpapan, 3. Kota Bontang, 4. Kabupaten Kutai Kartanegara, 5. Kabupaten Kutai Timur, 6. Kabupaten Kutai Barat, 7. Kabupaten Penajam Paser Utara, 8. Kabupaten Paser, 9. Kabupaten Berau, 10. Kabupaten Mahakam Ulu.

Data Sekolah Prov. Kalimantan Timur													
No	Kab/Kota	Total Sekolah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Kab. Kutai Kartanegara	1.327	384	165	8	2	16	11	481	158	52	44	6
2	Kota Samarinda	882	210	196	15	8	22	2	226	99	43	50	11
3	Kota Balikpapan	798	144	238	11	41	19	5	195	78	29	34	4
4	Kab. Kutai Timur	744	190	131	7	19	18	1	233	92	26	24	3
5	Kab. Paser	552	150	56	2	4	7	1	225	77	19	10	1
6	Kab. Kutai Barat	501	138	53	0	0	7	1	205	60	22	14	1
7	Kab. Berau	500	97	114	5	13	9	1	166	60	20	14	1
8	Kab. Penajam Paser Utara	320	72	66	9	3	5	0	107	36	10	11	1
9	Kota Bontang	281	55	39	17	35	17	1	57	29	11	14	6
10	Kab. Mahakam Ulu	142	41	34	1	0	1	0	38	17	7	2	1
Total		6047	1481	1092	75	125	121	23	1.933	706	239	217	35

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, permasalahan utama/ tantangan yang dihadapi BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam hal peningkatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan Platform Medeka Mengajar (PMM) oleh satuan Pendidikan;
- b) Peningkatan Mutu Literasi, Numerasi dan kualitas Pembelajaran bagi sekolah Penggerak;
- c) Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu untuk meningkatkan literasi bagi sekolah-sekolah dengan tingkat literasi masih di level 1;
- d) Penguatan kompetensi literasi dan numerasi dan pendidikan karakter siswa;
- e) Terganggunya operasional pembelajaran di Satuan pendidikan akibat tidak tersalurkannya BOSP;
- f) Digitalisasi satuan pendidikan dalam pembelajaran dan pengelolaan satuan Pendidikan;
- g) Kesehatan dan kebugaran peserta didik paska pandemi Covid-19;
- h) Kebijakan pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- i) Peningkatan jumlah sekolah yang mencapai kategori SNP.

2. Peran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

- a) BPMP Provinsi Kalimantan Timur memiliki peranan penting sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di provinsi Kalimantan Timur dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program prioritas nasional.
- b) BPMP Provinsi Kalimantan Timur berperan sangat penting bagi pemerintah daerah dan stakeholder pendidikan di wilayah Kalimantan Timur dalam mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan pemerintah.
- c) Peran BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola penjaminan mutu pendidikan di provinsi terkomunikasi dengan baik sangat penting dimana jejaring kerja sampai dengan satuan sekolah telah terjalin dan terkomunikasi dengan baik

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi Satuan Kerja

“Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berstandar nasional, berkarakter, berlandaskan semangat gotong-royong dan berwawasan global di provinsi”.

B. Misi Satuan Kerja

1. Melaksanakan pemetaan mutu PAUD, Dikdas, dan Dikmen di provinsi;
2. Melaksanakan supervisi satuan PAUD, Dikdas, dan Dikmen di provinsi;
3. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu PAUD, Dikdas, dan Dikmen di provinsi;
4. Melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu PAUD, Dikdas, dan Dikmen di provinsi;
5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam usaha pengembangan mutu pendidikan di provinsi;
6. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu PAUD, Dikdas, dan Dikmen di provinsi;
7. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang bersih dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

C. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun. Adapun Tujuan Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
2. Terwujudnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik

1. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam RENSTRA BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024, BPMP Provinsi Kalimantan Timur merevisi Renstra 2020 – 2024. Revisi ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dengan indikator dan target tahunan yang juga tentunya telah mengalami penyesuaian berdasarkan permendikbudristek nomor 13 tahun 2022. Adapun target kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan (Paud Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya			0.98	1.96	3.92
		1.2 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)			25%	30%	35%
2	Terwujudnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik	2.1. Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2.2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	83	83	83	84	84

2. Perjanjian Kinerja

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. BPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek. Perjanjian ini telah diubah sesuai dengan perubahan pagu dimana pada perjanjian awal sebesar **Rp30.720.770.000,00** menjadi **Rp35.836.656.000,00** pada perjanjian akhir, namun tidak merubah target Indikator Kinerja Kegiatan

a) Perjanjian Kinerja Awal

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.151.121.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 10.569.649.000
		TOTAL	Rp. 30.720.770.000

b) Perjanjian Kinerja Akhir

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 9.389.848.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 26.446.717.000
		TOTAL	Rp. 35.836.565.000

D. Program Prioritas

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Isu-isu Strategis, BPMP Provinsi Kalimantan Timur menurunkan Objektif dan Target sebagai turunan Objektif dan Target Direktorat Jenderal PAUD DIKDASMEN dalam sebuah *Project Charter* berikut ini:

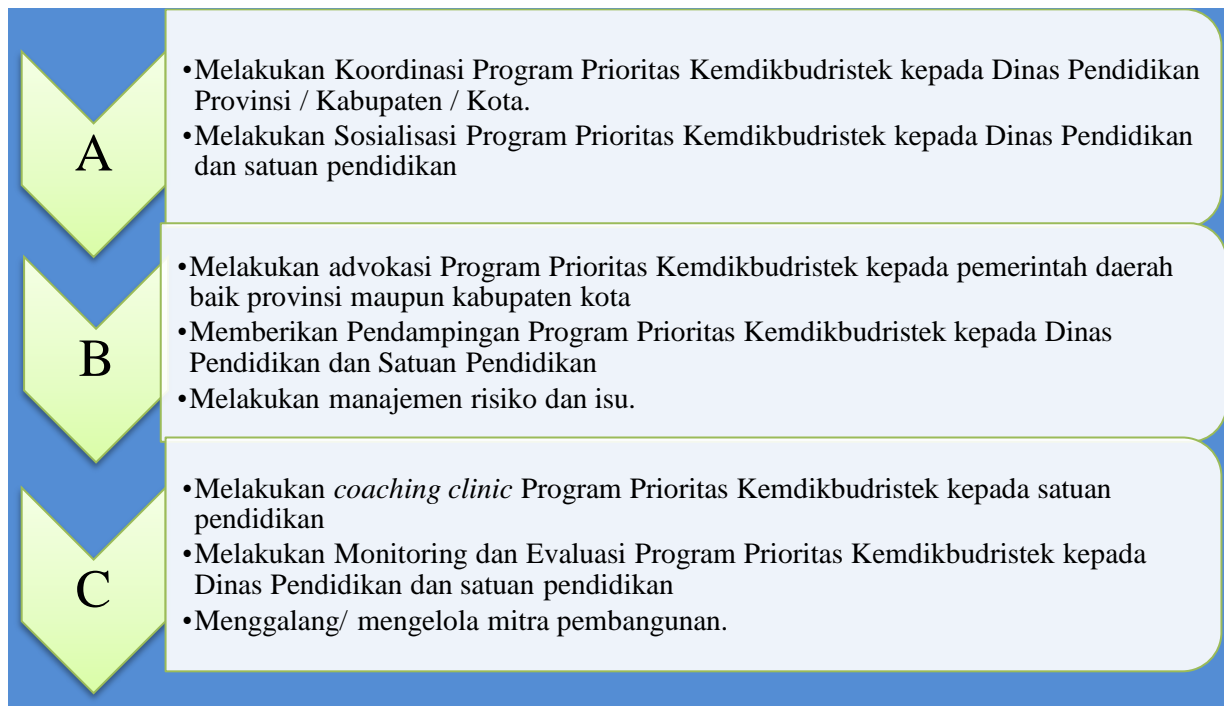
No	Objektif	Target
1	Meningkatnya jumlah Guru Penggerak diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	80% dari jumlah Guru Penggerak yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi Kepala Sekolah
		80% dari jumlah Guru Penggerak yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi Pengawas Sekolah
2	Optimalisasi Pemanfaatan Hibah Buku Bacaan Bermutu	100% satuan pendidikan penerima buku bacaan bermutu mengikuti Bimtek
		100% satuan pendidikan penerima buku bacaan bermutu mendapatkan pendampingan pemanfaatan buku bacaan bermutu melalui kegiatan komunitas belajar
3	Optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	100% Pemerintah Daerah mengeluarkan SE tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
		100% Pemerintah Daerah membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas)
4	Meningkatnya pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai penunjang pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka	100% dari jumlah Satuan Pendidikan yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan dengan baik
		100% dari jumlah Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan pendampingan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan baik
5	Meningkatnya Mutu Literasi, Numerasi dan Kualitas Pembelajaran bagi Sekolah Penggerak	100% Sekolah Penggerak dengan kategori mutu Literasi Baik
		100% Sekolah Penggerak telah mendapatkan pendampingan penguatan Literasi

No	Objektif	Target
6	Meningkatnya jumlah satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran di PAUD dan SD yang menyenangkan mengacu pada Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan	100% Satuan Pendidikan yang melaksanakan Proses Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan melakukan Assesmen Awal Pembelajaran pada Masa Pengenalan Lingkungan sekolah (MPLS)
		100% Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Pendampingan Proses Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan melakukan Assesmen Awal Pembelajaran pada Masa Pengenalan Lingkungan sekolah (MPLS)
7	Meningkatkan Adopsi Platform SDS (ARKAS, SIPLah) sebagai langkah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan pendidikan	100% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS 4.0
		50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan ARKAS 4.0
		60% satuan pendidikan menggunakan SIPLAH
		100% satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu
		50% satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1
8	Optimalisasi Pemanfaatan <i>Chromebook</i> dan Belajar.id dalam proses pembelajaran	100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK memanfaatkan <i>Chromebook</i> dalam proses pembelajaran
		100% akun belajar.id aktif
		50% satuan pendidikan memanfaatkan <i>Google Workspace for Education</i>
9	Menumbuhkan Gerakan Sekolah Sehat	75% Pemerintah Daerah mengeluarkan SE tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat
		75% dari satuan pendidikan binaan (1360 satuan pendidikan) mengimplementasikan program

No	Objektif	Target
		gerakan sekolah sehat dan terpetakan kebugaran peserta didiknya
10	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Satuan Pendidikan Pauddasmen mengakses dan mengeksplorasi Rapor Pendidikan.	100% Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakses Rapor Pendidikan;
		100% Satuan Pendidikan Dasmen
		50% PAUD mengakses Rapor Pendidikan.
11	Satuan pendidikan melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan melakukan pembelajaran mandiri PBD melalui PMM.	80% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan PBD melalui unduh lembar PBD.
		45% PAUD melaksanakan perencanaan berbasis data melalui unduh lembar PBD.
		30% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan.
12	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) melaksanakan PBD dengan memenuhi target SPM Pendidikan dalam perencanaannya	50% Pemda memasukkan indikator kinerja SPM Pendidikan.
		50% Pemda memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
13	Pemerintah Daerah memiliki delta positif indeks SPM Pendidikan	30% Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
14	Meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023.	Partisipasi AN SD 100%; Sulingjar SD 96%
		Partisipasi AN SMP 100%; Sulingjar SMP 96%
		Partisipasi AN SMA 99%; Sulingjar SMA 98%
		Partisipasi AN SLB 83 % Sulingjar SLB 90%
		Partisipasi AN Kesetaraan 73 %; Sulingjar 47%
		Partisipasi Sulingjar PAUD 30%

E. Strategi Pencapaian Program Prioritas

Untuk mencapai target yang telah di tentukan, maka berbagai strategi dilaksanakan melalui program kegiatan berupa :



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, BPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Upaya BPMP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penjaminan dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan : pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan dengan metode: pembinaan, penguatan, pembimbingan, pendampingan, monitoring, supervisi dan advokasi terhadap SDM pemerintah daerah dalam implementasi PMO (Program Manajemen Office) dan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan serta terwujudnya tata kelola yang baik bagi satuan pendidikan.

Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan maka setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96 %	1,7%	87,7%
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30%	100%	333%
2.	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	A (84)	A (86,10)	100%
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	84	93,58	111%

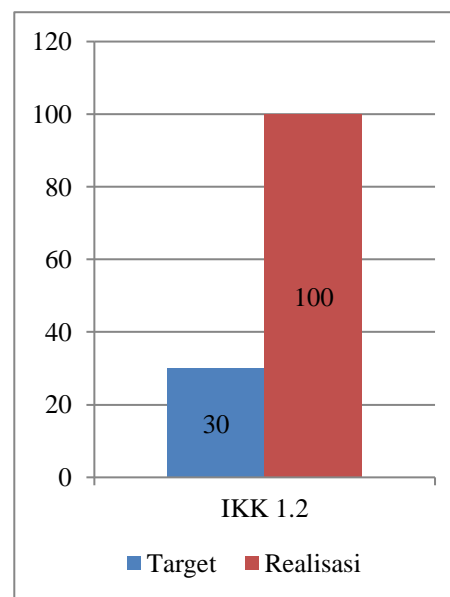
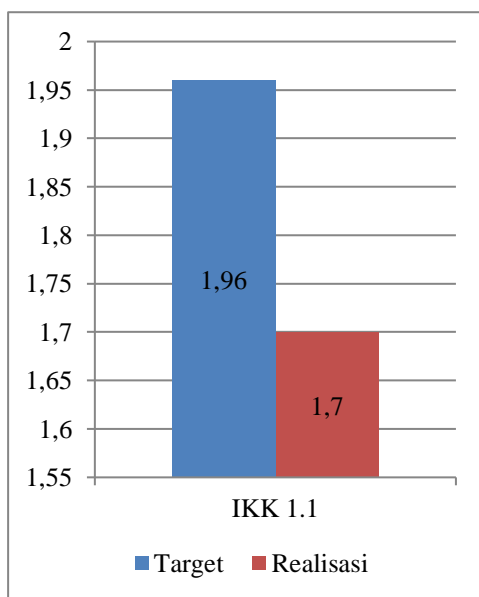
1. Sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

Ketercapaian sasaran strategis “*meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen*” didukung melalui ketercapaian 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang menngkat mutu pembelajarannya; Indikator tersebut didukung oleh program yang dijalankan oleh PDM sebagai berikut :
 1. PDM 01 : Program Sekolah Penggerak
 2. PDM 02 : Implementasi Kurikulum Merdeka
 3. PDM 3A : Sumber Daya Sekolah
 4. PDM 3B : Bantuan Operasional Sekolah dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
 5. PDM 04 : Perencanaan Bebas Data
 6. PDM 07 : Publikasi dan Komunikasi
 7. PDM 09 : Transisi PAUD yang menyenangkan
 8. PDM 11 : Gerakan Sekolah Sehat

2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen. Indikator tersebut didukung oleh program yang dijalankan oleh PDM sebagai berikut :
 1. PDM 01 : Program Sekolah Penggerak
 2. PDM 02 : Implementasi Kurikulum Merdeka
 3. PDM 3A : Sumber Daya Sekolah
 4. PDM 3B : Bantuan Operasional Sekolah dan Aplkasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
 5. PDM 04 : Perencanaan Bebas Data
 6. PDM 05 : Kemitraan
 7. PDM 06 : Asesmen Nasional
 8. PDM 07 : Publikasi dan Komunikasi
 9. PDM 09 : Transisi PAUD yang menyenangkan
 10. PDM 10 : Pemulihan Pembelajaran
 11. PDM 11 : Gerakan Sekolah Sehat
 12. PDM 12 : Pendidikan Khusus.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran kinerja 1 [SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2023 pada indikator [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan PAUD Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya tercapai target 87.7% dari target PK sebesar 1.96% dengan realiasi peningkatan 1.7%. Adapun [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) tercapai target 333% dari target PK sebesar 30% dengan realiasi peningkatan 100%. Seperti tampak pada grafik di bawah ini :



1.1. Persentase Satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan berdasarkan indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Definisi

Sesuai dengan Definisi Operasional untuk indikator kinerja kegiatan 1.1 " Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya" yaitu Persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

Metode Perhitungan: Memanfaatkan Assesmen Nasional

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Yang meningkat Rapor Pendidikannya}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dalam satu wilayah}} \times 100\%$$

Atau

Metode Perhitungan: Memanfaatkan Hasil Akreditasi Sekolah

$$\frac{(0,5 \times A_{23}) + (0,35 \times B_{23}) + (0,15 \times C_{23})}{\text{Total Sekolah TA 2023}} - \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{\text{Total Sekolah TA 2022}}$$

Keterangan

A_{23} adalah jumlah satpen yang mendapat akreditasi A tahun 2023

B_{23} adalah jumlah satpen yang mendapat akreditasi B tahun 2023

C_{23} adalah jumlah satpen yang mendapat akreditasi C tahun 2023

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan hasil penilaian akreditasi sekolah, hasil akreditasi satuan pendidikan sebagai berikut:

REALISASI 2022	TAHUN 2023			TARGET RENSTRA 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2024
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN		
17,98 %	1.96 %	1,7 %	87,7 %	3.92	43,4 %

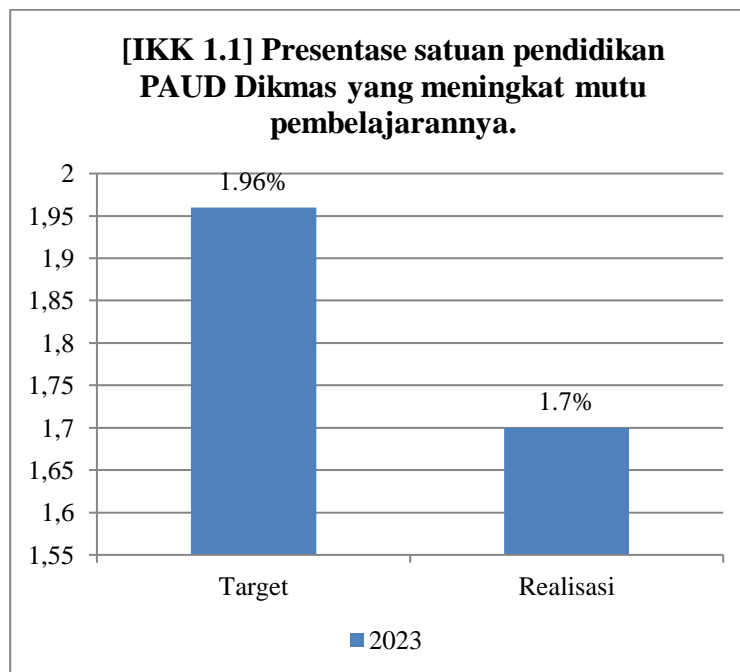
Capaian kinerja tahun 2023 untuk IKK 1.1 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lebih rendah dikarenakan Jumlah satuan Pendidikan yang mengikuti akreditasi di tahun 2023 sangat sedikit. Sedangkan capaian realisasi IKK 1.1 berada di dibawah dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya proses penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 SNP melalui advokasi, pendampingan, dan monitoring yang diterapkan di satuan pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan PAUD. Walaupun demikian pencapaiannya belum mencapai target yang ditetapkan jika capaian ini diperbandingkan dengan target akhir renstra 2024 diperoleh hasil sebesar 43,4%, capaian tersebut menunjukkan memerlukan upaya yang lebih dalam mencapai target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni sebesar 3.92%.

Hasil penilaian diatas berdasarkan capaian akreditasi PAUD tahun 2023 dimana proses penjaminan mutu pendidikan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur baru dilakukan pada program Pendampingan Transisi PAUD yang menyenangkan belum menyentuh pada proses pembelajarannya. Hal ini disebabkan masa transisi tupoksi dari BPMP Provinsi Kalimantan Timur dimana penanganan satuan pendidikan PAUD baru dilaksanakan pada tahun 2023.

Hasil dari akreditasi satuan pendidikan PAUD dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tahun	Akreditasi A	Akreditasi B	Blm Treakreditasi	Akreditasi C	Terakreditasi	Tidak diisi	Tidak Terakreditasi	Jumlah Sekolah
2022	171	961	67	472	49	1.108	9	2.837
2023	164	1.000	33	659	44	861	12	2.773

Adapun grafik pencapaian Akreditasi diatas sebagai berikut:



Adapun program dan kegiatan, yang mendukung realisasi target kinerja Indikator Kinerja IKK 1.1. diawali dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang valid. Data tersebut dipergunakan untuk mendukung Program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), Tata Kelola Satuan Pendidikan, Literasi dan Numerasi di jenjang PAUD dan Dikmas serta kemitraan dengan pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan karena adanya hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan BPMP Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mengakses platform Dapodik, sehingga intervensi yang dilakukan terhadap sasaran satuan pendidikan sangat terbatas.
- 2) Tidak tersampainya beberapa informasi terkait kebijakan dari Kementerian tentang Pendidikan PAUD.
- 3) Keterbatasan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan program prioritas Kemdikbudristek seperti IKM, PMM, akun belajar, dan Akreditasi.
- 4) Tidak semua pemerintah daerah responsif dalam membuat payung hukum terkait kebijakan program prioritas Kemdikbudristek.

Selain faktor penghambat dan permasalahan diatas dalam pelaksanaan program dalam rangka pencapaian IKK 1.1. terdapat juga beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator, diantaranya :

- 1) Tersedianya dukungan sumber daya manusia baik yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan program di BPMP Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Tersedianya dukungan keuangan yang menunjang pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah :

- 1) Melakukan komunikasi secara intens dengan stakeholder pemerintah daerah melalui rapat PMO daerah yang dilakukan secara rutin setiap bulan atau komunikasi yang lainnya
- 2) Melakukan komunikasi setiap bulan dengan BGP Provinsi Kalimantan Timur untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mengawal dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi lapangan dalam implementasi kebijakan pusat.
- 3) Melakukan advokasi dan pendampingan pada pemda untuk menggali akar masalah yang dihadapi lapangan.

1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

1. Definisi

Persentase dari Provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing – masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah daerah Yang meningkat mutunya}}{\text{Total Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \sum_{i=1}^n \text{flag}(\Delta_i)$$

Keterangan :

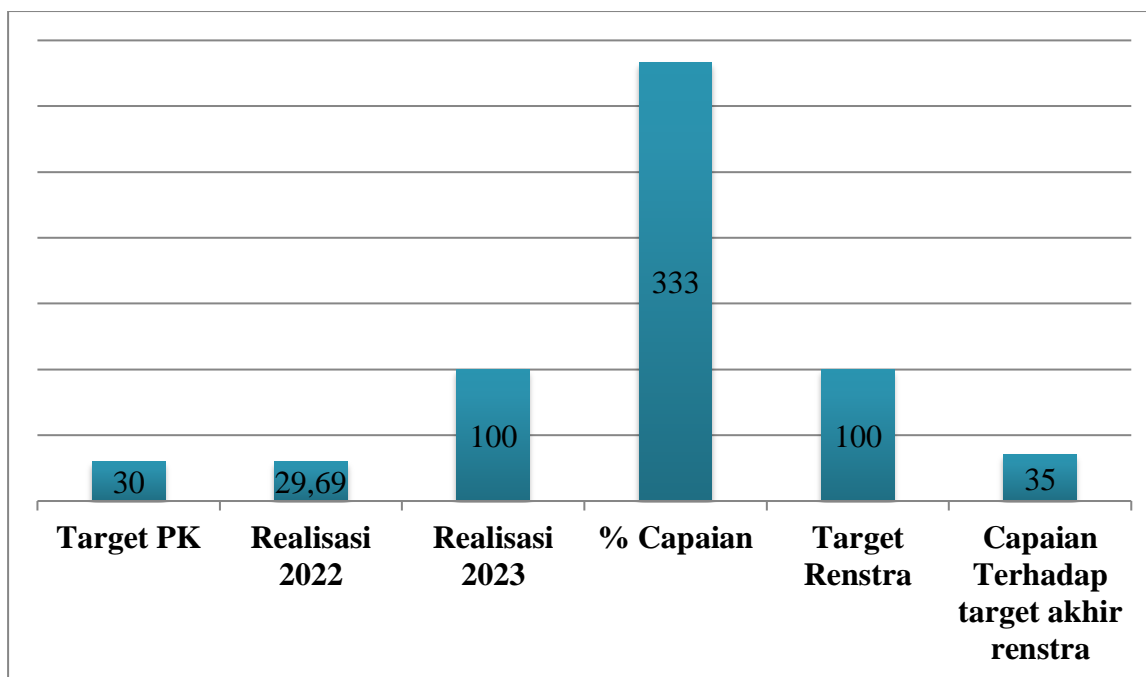
1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan
2. $\text{flag}(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Ketercapaian indikator 1.2 ini, diperoleh dari hasil peningkatan rapor pendidikan. Hasil peningkatan mutu pendidikan/peningkatan rapor pendidikan ini diperoleh dari Ditjen Paud Dikdasmen. Adapun hasil dari peningkatan rapor pendidikan adalah sebagai berikut:

REALISASI 2022	TAHUN 2023		TARGET RENSTRA 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2024	
	TARGET PK	REALISASI			CAPAIAN
29.69 %	30%	100%	333%	35 %	100 %

Berdasarkan data di atas, target [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) tahun 2023 adalah 30% ini didasarkan dengan tahun 2022 terealisasi 29,69% sedangkan pada tahun 2023 ini terealisasi 100%, dengan demikian persentasi capaian kinerja sebesar 333%. Hal ini menunjukkan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur meningkat rapor pendidikannya sebesar 100% yang diperoleh dari peningkatan 10 kabupaten/kota dan 1 Provinsi dari tahun 2022 dan tahun 2023. Sedangkan capaian terhadap target akhir renstra mengalami kenaikan sebesar 100%, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni 35%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan adanya kenaikan rapor pendidikan satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota karena rapor pendidikan di dapat melalui sistem yang terintegrasi dengan DAPODIK, EMIS, BPS, Sulingjar, Asesmen Nasional, dan atau data lain yang tersedia yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan.



Untuk mencapai indikator kinerja diatas dimana telah mencapai 3 kali lipat dari target didukung oleh beberapa program yang telah dilakukan sebagai berikut.

1. 100% Pemerintah Daerah di provinsi Kalimantan Timur telah mengakses Rapor Pendidikan (1 Provinsi dan 10 Kab/Kota), hal ini terlihat dari dashboard adopsi rapor Pendidikan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Satuan Pendidikan Pauddasmen mengakses dan mengeksplorasi Rapor Pendidikan.
2. 98,20% Satuan Pendidikan Dasmen telah akses Rapor Pendidikan, hal ini terlihat dari dashboard adopsi rapor Pendidikan.
3. 97,12% Satuan pendidikan melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan melakukan pembelajaran mandiri PBD melalui PMM.
4. 30% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan.
5. 100% Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) melaksanakan PBD dengan memenuhi target SPM Pendidikan dalam perencanaannya
6. 100% Pemda memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
7. Meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah pelaksana Asesmen nasional dengan prosentase sebesar 98,91%, dengan kontribusi peserta Sulingjar SD 96,97%.
 - b. Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sekolah pelaksana Asesmen nasional dengan prosentase sebesar 98,61%, dengan kontribusi peserta Sulingjar

SMP 98,20%.

- c. Pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah pelaksana Asesmen nasional dengan prosentase sebesar 96,90%, dengan kontribusi peserta Sulingjar SMA 99,98%.
- d. Pada sekolah luar biasa (SLB), sekolah pelaksana Asesmen nasional dengan prosentase sebesar 85% , dengan kontribusi peserta Sulingjar SLB 62,89%.
- e. Pada Kesetaraan, sekolah pelaksana Asesmen nasional dengan prosentase sebesar 90,85%, dengan kontribusi peserta Sulingjar 71,50%.
- f. Pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), kontribusi peserta Sulingjar mencapai 86,64%

Pencapaian pada indikator kinerja 1.2 ini sebesar 333% lebih tinggi dari target. Meskipun demikian terdapat hambatan dan permasalahan diantaranya :

- 1) Rapor pendidikan *release* setelah renstra daerah final sehingga sulit untuk menambahkan sub indikator pada SPM.
- 2) Tidak semua pemerintah daerah menganggarkan setiap indikator pemenuhan SPM.
- 3) Keterbatasan pemahaman pemerintah daerah terhadap pemanfaatan rapor pendidikan dalam melakukan perencanaan.

Selain faktor penghambat dan permasalahan di atas dalam pelaksanaan program dalam rangka pencapaian IKK 1.1. terdapat juga beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator, diantaranya :

- 1) Tersedianya dukungan Sumber daya manusia baik yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan program di BPMP Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Tersedianya dukungan keuangan yang menunjang pelaksanaan program/kegiatan.
- 3) Tersedianya dukungan serta komitmen Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dalam berbagai program/kegiatan.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah :

- 1) Melakukan komunikasi secara intens dengan *stakeholder* pemerintah daerah melalui rapat PMO daerah yang dilakukan secara rutin setiap bulan atau komunikasi yang lainnya
- 2) Melakukan komunikasi setiap minggu dengan PDM untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mengawal dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi lapangan dalam implementasi kebijakan pusat.
- 3) Melakukan advokasi dan pendampingan pada pemda untuk menggali akar masalah yang dihadapi lapangan

- 4) Melakukan kegiatan *coaching* Perencanaan Berbasis Data untuk satuan pendidikan.

2. Sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

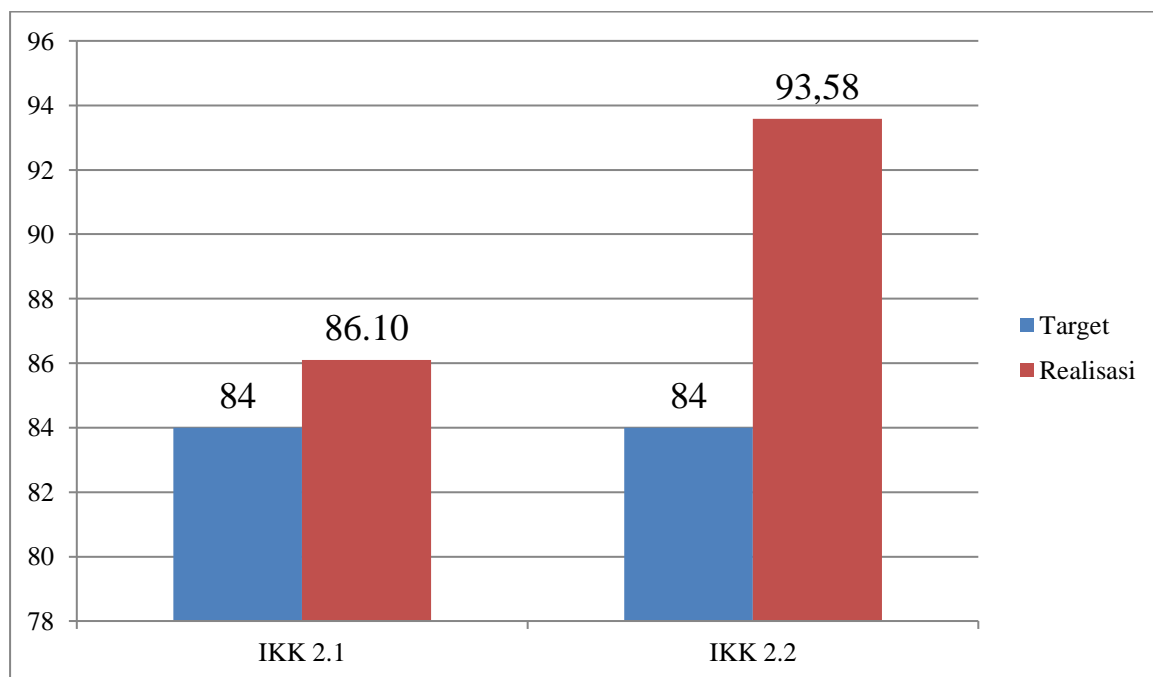
Ketercapaian sasaran strategis “*Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur*” didukung melalui ketercapaian 2 indikator kinerja dengan dukungan beberapa program/kegiatan sebagai berikut :

1. [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur di dukung oleh kegiatan sebagai berikut:
 - 2005.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - 2005.EBA.962. Layanan Umum
 - 055. Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - A. Pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan
 - B. Pengelolaan kepegawaian
 - C. Perencanaan program dan anggaran, penyusunan laporan keuangan, SAKIP
 - D. Pelaksanaan manajemen WBK
 - E. Penilaian angka kredit IVB ke atas bagi guru
 - F. Unit Layanan Terpadu Keliling
 - G. Pengelolaan arsiparis
2. [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur , didukung oleh Output/kegiatan sebagai berikut:
 - 2005.EBA.994. Layanan perkantoran
 - 001. Gaji dan tunjangan
 - A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - 002. Operasional dan pemeliharaan kantor
 - A. Kebutuhan sehari hari perkantoran
 - B. Langganan Daya dan Jasa
 - C. Pemeliharaan Perkantoran
 - D. Penggantian barang inventaris
 - E. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran
 - 2005.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 2005.EBB.951. Layanan Sarana Internal
 - 997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 - A. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Ketercapaian sasaran kegiatan terkait tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan adanya peningkatan nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi sebanyak 5 tahun berturut-turut sampai tahun 2023 ini. Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Timur akan senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja,

dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja sebagai prioritas utama.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata pencapaian sasaran (*outcome*) [SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur adalah 86,10 (A), Realisasi ini berada di atas dari target yang seharusnya yakni 84 (A). Sedangkan untuk [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur adalah 93,58. Realisasi ini berada di atas dari target seharusnya 84. Seperti pada grafik berikut ini :



2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

1. Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 299 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

2. Metode Perhitungan:

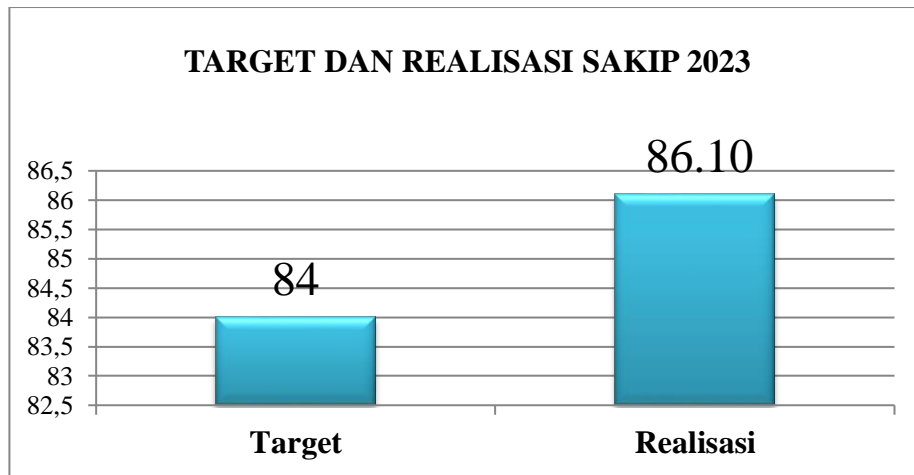
Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja)

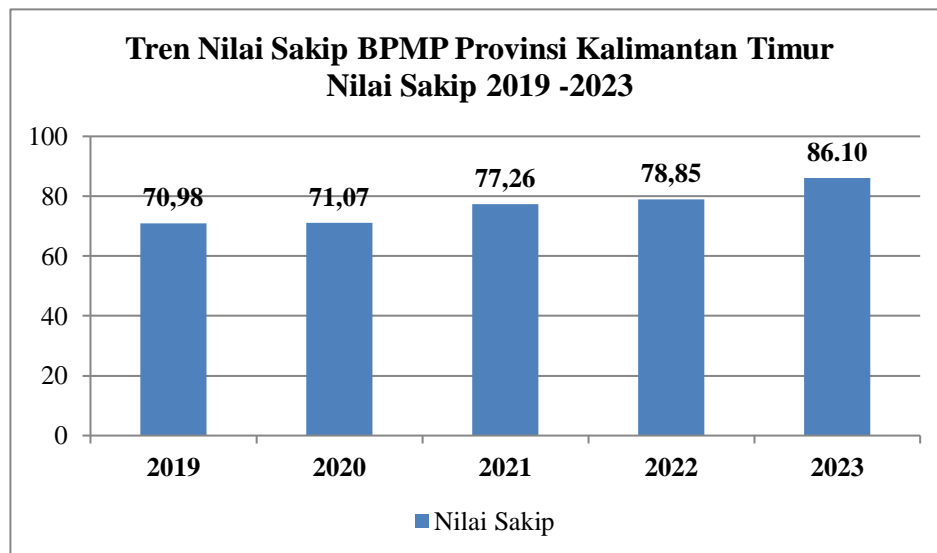
Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dari nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur. SAKIP ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu SAKIP ini perlu dievaluasi setiap tahun atas pelaksanaan program untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yaitu anggaran digunakan secara efektif untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas, seperti pemulihan ekonomi, *refocusing* program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk tahun 2023 realisasi diperoleh sebesar 86,10 (A) ini berada diatas target yang ditetapkan sebesar 84 (A) seperti tampak pada tabel berikut :



Adapun tren nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2019, 2020 dan 2021 dan 2022, 2023 sebagai berikut :



2.2. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L

1. Definisi:

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

2. Metode Perhitungan:

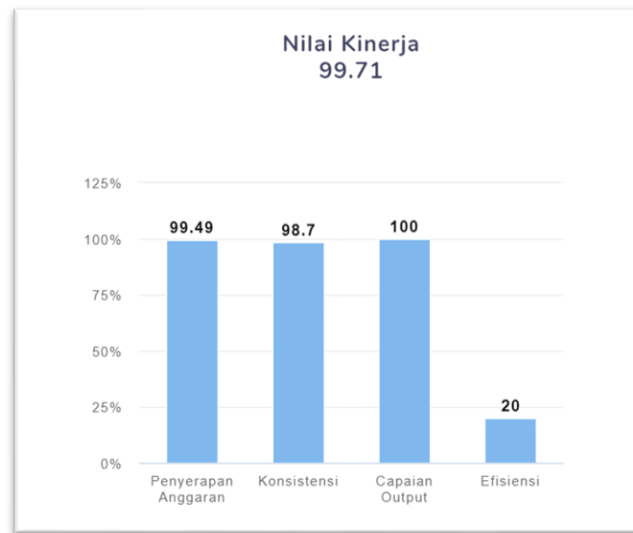
Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA})$$

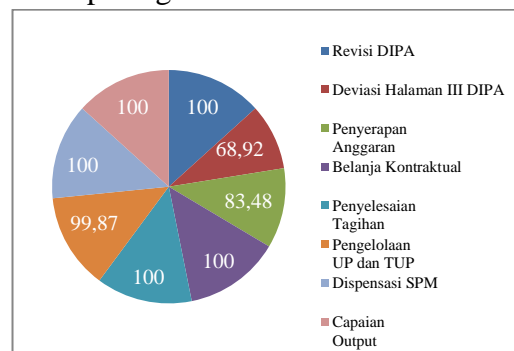
Keterangan:

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Nilai dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini



Nilai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini



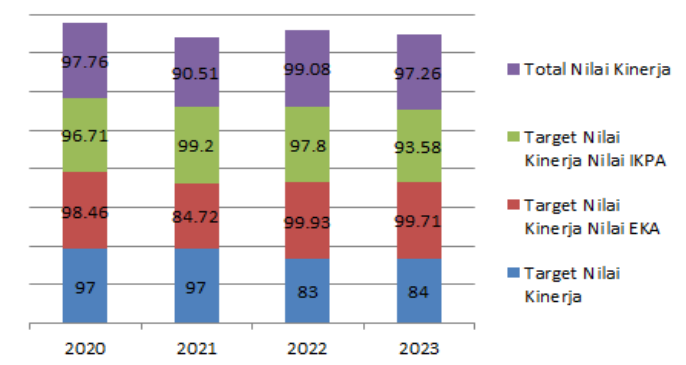
Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2020 - 2023

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik
2022	83	99.93	97.80	99.08	Sangat Baik
2023	84	99.71	93,58	97,26	Sangat Baik

Sumber: Aplikasi Spasikita(simproka)

Adapun grafik Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2020 - 2023 sebagai berikut:

Perbandingan Capaian IKPA, EKA dan NKA
BPMP Provinsi Kaltim Tahun 2020 - 2023



Berikut capaian NKA Seluruh BPMP/BBPMP tahun 2023 :

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai EKA	Nilai IKPA	NKA	Nilai EKA	Nilai IKPA	NKA	No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai EKA	Nilai IKPA	NKA	Nilai EKA	Nilai IKPA	NKA
1	419510	BPMP PROVINSI GORONTALO	99.84	97.28	98.82	99.84	97.28	98.82	18	417808	BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA	97.30	95.23	96.47	97.31	95.23	96.48
2	419547	BPMP PROVINSI PAPUA	99.80	95.15	97.94	99.80	95.15	97.94	19	419513	BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT	98.43	93.12	96.31	98.43	93.12	96.31
3	419536	BPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	99.85	94.85	97.85	99.85	94.85	97.85	20	419546	BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	99.40	91.65	96.30	99.40	91.65	96.30
4	419545	BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	98.17	96.93	97.67	98.17	96.93	97.67	21	419526	BPMP PROVINSI RIAU	98.17	92.67	95.97	98.17	92.67	95.97
5	419519	BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH	99.87	94.31	97.65	99.87	94.31	97.65	22	419516	BPMP PROVINSI D.K.I. JAKARTA	98.42	91.86	95.80	98.42	91.86	95.80
6	419566	BPMP PROVINSI MALUKU UTARA	99.82	94.39	97.65	99.82	94.39	97.65	23	419527	BPMP PROVINSI JAMBI	99.08	90.52	95.66	99.08	90.52	95.65
7	417798	BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	99.69	94.49	97.61	99.69	94.49	97.61	24	419522	BPMP PROVINSI ACEH	97.62	92.65	95.63	97.60	92.65	95.62
8	419543	BPMP PROVINSI MALUKU	99.63	94.26	97.48	99.63	94.26	97.48	25	419577	BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	96.91	92.95	95.33	96.91	92.95	95.33
9	419567	BPMP PROVINSI BANTEN	99.73	93.62	97.29	99.73	93.62	97.28	26	419523	BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	91.81	90.68	91.36	98.30	90.68	95.25
10	417799	BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	99.71	93.58	97.26	99.71	93.58	97.26	27	417810	BBPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN	96.88	91.67	94.80	96.89	91.67	94.80
11	419520	BPMP PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	99.53	93.51	97.12	99.53	93.51	97.12	28	419548	BPMP PROVINSI BENGKULU	95.94	91.40	94.12	95.94	91.40	94.12
12	417653	BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA	99.95	92.75	97.07	99.95	92.75	97.07	29	419535	BPMP PROVINSI KALIMANTAN BARAT	97.09	89.65	94.11	97.09	89.65	94.11
13	419517	BBPMP PROVINSI JAWA BARAT	99.82	92.53	96.90	99.82	92.53	96.93	30	419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	96.50	90.47	94.09	96.50	90.47	94.09
14	417809	BPMP PROVINSI SULAWESI TENGAH	99.54	92.83	96.86	99.54	92.83	96.85	31	419529	BPMP PROVINSI LAMPUNG	93.66	94.55	94.02	93.66	94.55	94.01
15	419511	BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	98.62	94.17	96.84	98.62	94.17	96.84	32	417811	BBPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	93.53	92.48	93.11	93.53	92.48	93.11
16	419544	BPMP PROVINSI BALI	99.48	92.30	96.61	99.48	92.30	96.61	33	419525	BBPMP PROVINSI SUMATERA BARAT	86.78	89.39	87.82	95.43	89.39	93.01
17	419521	BBPMP PROVINSI JAWA TIMUR	99.64	91.74	96.48	99.64	91.74	96.48	34	419512	BPMP PROVINSI PAPUA BARAT	91.02	87.79	89.73	91.14	87.79	89.80

Dalam melaksanakan program tahunan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, proses pelaksanaannya dilakukan evaluasi yang terpantau dalam sebuah sistem aplikasi yang saling terintegrasi. Aplikasi tersebut secara terpusat dan dikembangkan oleh biro perencanaan Kemdikbudristek yang dikenal dengan aplikasi Spasikita. Aplikasi Spasikita sebagai media dalam melakukan pemantauan, penginputan dan evaluasi proses pelaksanaan program dan evaluasi hasil pelaksanaan program baik realisasi secara fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan aplikasi Spasikita, nilai kinerja anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2023 mencapai hasil di atas dari target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yakni 84. Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, dimana pada tahun 2023 ini BPMP Provinsi Kalimantan Timur berada pada nilai 97,26, peringkat 10 dari seluruh BPMP yang ada di bawah Dirjen PAUD Dikdasmen. Hal ini disebabkan karena terjalinnya hubungan komunikasi secara intens dalam proses pelaksanaan anggaran baik secara internal maupun secara eksternal sehingga permasalahan dalam proses perealisasi kegiatan dan anggaran mendapatkan solusi terbaik.

PRESTASI

Adapun prestasi lainnya yang pernah diraih oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Satuan kerja dengan Transaksi Terbesar Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020
2. Satuan Kerja Pengelola Belanja Modal Pagu Besar Terbaik T.A 2020
3. Peringkat Kedua IKPA Terbaik Katagori Satker Besar Tahun 2020
4. Unit Layanan Terpadu di Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Prediksi “Baik dengan Catatan” Tahun 2020
5. Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik dalam Katagori Penyampaian Kontrak Tahun 2020
6. Peringkat Tiga Satuan Kerja dengan Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dengan sebesar 98,96%
7. Perpustakaan Terakreditasi B
8. Penghargaan ZI-WBK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023





Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja 2.1 dan 2.2 pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2023, strategi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian target kinerja adalah berusaha menjalankan setiap program sesuai dengan yang amanat reformasi birokrasi. Mulai dari reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), reformasi anggaran berbasis kinerja, reformasi organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan reformasi sistem sumber daya aparatur yang berorientasi utama pada kinerja.

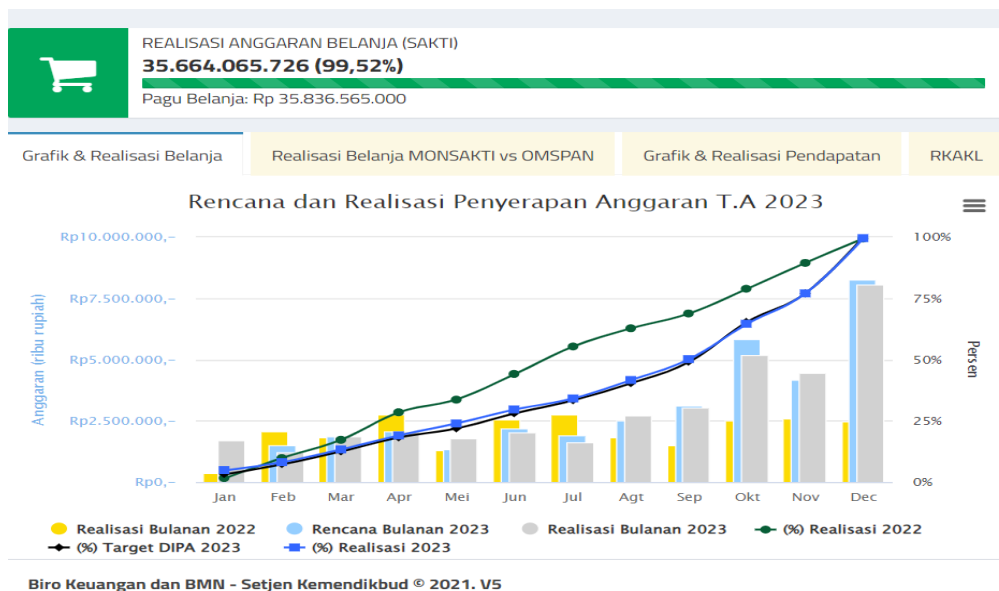
B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

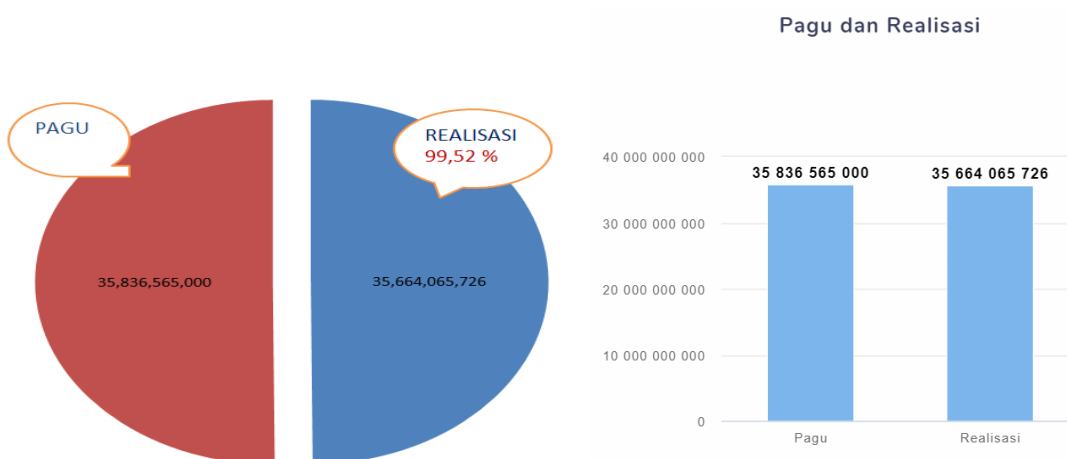
Berdasarkan revisi terakhir Pagu Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.836.565.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Pagu awal anggaran pada saat perjanjian kinerja adalah Rp30.720.770.000,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Pagu anggaran ini mengalami revisi (terjadi penambahan anggaran) sebesar Rp5.115.795.000,00 (Lima Milyar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh pusat karena adanya penambahan target output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Dari pagu anggaran revisi terakhir tersebut berhasil direalisasikan sebesar RP35.664.065.726 dengan persentase daya serap sebesar 99.52%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi SPM (Rp)	Realisasi SP2D
1	BELANJA PEGAWAI	8.688.916.000	0	8.642.621.642	99,47
2	BELANJA BARANG	19.597.649.000	54.000.000	19.472.598.084	99,36
3	BELANJA MODAL	7.550.000.000	0	7.548.846.000	99,98
	TOTAL	35.836.565.000	54.000.000	35.664.065.726	99,52

No	Program / Kegiatan / KRO / RO	Capaian Rincian Output			Pagu	Blokir	SPM		SP2D	
		Target	Realisasi	%			Realisasi	%	Realisasi	%
1	[DI] Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				9.389.848.000	54.000.000	9.335.820.879	99,42	9.335.820.879	99,42
2	[6397] Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas				9.389.848.000	54.000.000	9.335.820.879	99,42	9.335.820.879	99,42
3	[6397.QDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga				9.389.848.000	54.000.000	9.335.820.879	99,42	9.335.820.879	99,42
4	[6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	2.868	3.708	129,29	8.330.690.000	54.000.000	8.276.668.041	99,35	8.276.668.041	99,35
5	[6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	2.843	3.343	117,59	1.059.158.000	0	1.059.152.838	100,00	1.059.152.838	100,00
6	[WA] Program Dukungan Manajemen				26.446.717.000	0	26.328.244.847	99,55	26.328.244.847	99,55
7	[2005] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah				26.446.717.000	0	26.328.244.847	99,55	26.328.244.847	99,55
8	[2005.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal				18.896.717.000	0	18.779.398.847	99,38	18.779.398.847	99,38
9	[2005.EBA.962] Layanan Umum	1	2	200,00	375.000.000	0	374.995.261	100,00	374.995.261	100,00
10	[2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	12	12	100,00	18.521.717.000	0	18.404.403.586	99,37	18.404.403.586	99,37
11	[2005.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal				7.550.000.000	0	7.548.846.000	99,98	7.548.846.000	99,98
12	[2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	1	2	200,00	2.550.000.000	0	2.549.133.200	99,97	2.549.133.200	99,97
13	[2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	3.024	3.024	100,00	5.000.000.000	0	4.999.712.800	99,99	4.999.712.800	99,99
TOTAL					35.836.565.000	54.000.000	35.664.065.726	99,52	35.664.065.726	99,52

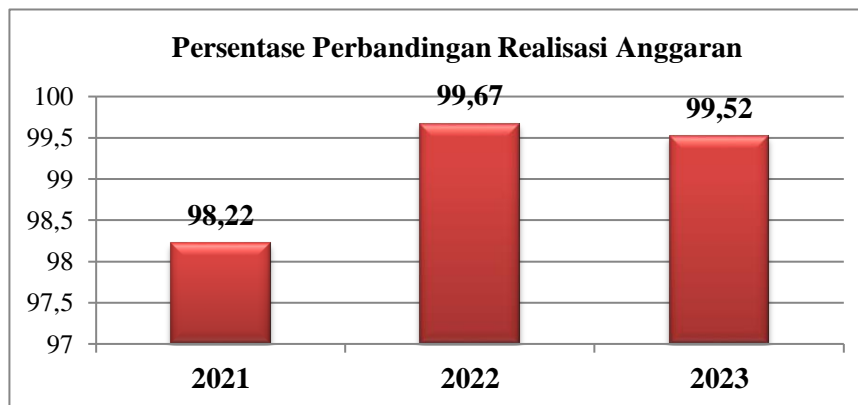


Sedangkan total capaian realisasi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2023 sebagai berikut:



Capaian Total Realisasi Anggaran 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Grafik persentase perbandingan realisasi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut;



Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, terdiri atas 2 indikator kinerja (persentase satuan pendidikan PAUD, Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya dan persentase provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), pada tahun 2023, *Output* Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, terdiri atas 2 indikator kinerja (persentase satuan pendidikan PAUD, Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya dan persentase provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), pada tahun 2023, terealisasi sebesar Rp9.335.820.879,00 dengan persentase capaian sebesar 99,42% dari jumlah pagu Rp9.389.848.000,00 dengan rincian indikator 1.1 terealisasi sebesar Rp8.276.668.041 dengan persentase 99,35% sedangkan untuk 1.2 terealisasi sebesar Rp1.059.152.838 dengan persentase 99,99%.

Sedangkan sasaran strategis meningkatnya tata kelola BPMP, didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Nilai minimal SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur (indikator 2.1) dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L (indikator 2.2).

Output ini didukung oleh 2 indikator kinerja kegiatan yaitu *Output* layanan perkantoran, dan layanan umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.446.717.000,00 yang terealisasi sebesar Rp26.328.244.847,00 atau 99,55 %, dengan rincian indikator 2.1 terealisasi sebesar Rp Rp18.779398847,00 dengan persentase 99,38% sedangkan untuk 2.2 terealisasi sebesar Rp7548.846.000, 00 dengan persentase 99,98%.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp7.167.313.000,00 dan efisiensi sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran dimana BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan capaian fisik melebihi dari target output dengan anggaran yang terbatas dapat melakukan berbagai kegiatan dan menambah realisasi output

baik secara daring maupun luring. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja barang, yang meliputi :

- a. optimalisasi kegiatan perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, belanja bahan, belanja operasional non operasional lainnya.
- b. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring

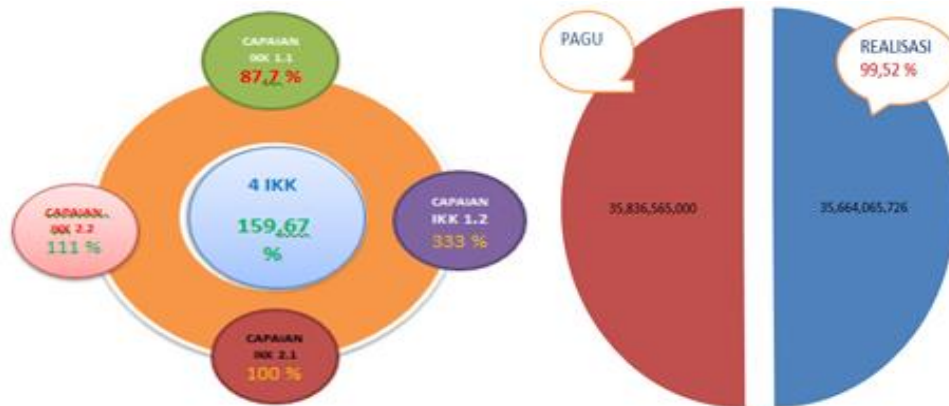
Refocusing anggaran juga dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan kegiatan yang prioritas seperti IKM. Anggaran hasil efisiensi digunakan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas yakni kegiatan Perencanaan Berbasis Data di seluruh sekolah baik dalam bentuk daring maupun dalam bentuk luring dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas penganggaran ini berdasar pada 3 prinsip yakni prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2023, BPMP Provinsi Kalimantan Timur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Sesuai target yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tercapai dengan rata-rata capaian 159,67% dengan rincian sebagai berikut



Secara garis besar, dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, hanya 1 IKK yang belum mencapai target yaitu IKK1.1 Persentase Satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Pencapaian target 4 IKK tersebut didukung oleh kinerja keuangan di tahun 2023 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp35.664.065.776,00 atau 99,52% dari total pagu Rp35.836.565.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2022 Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur menurun yaitu dari 99,67% menjadi 99,52%.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pencapaian kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lebih besar kepada peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk regulasi yang berpihak pada mutu guru, kepala sekolah, dan pengawas.
2. Melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk melakukan persiapan pengimbasan oleh Sekolah Penggerak Angkatan 1.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam melakukan penganggaran bidang pendidikan

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Pemanfaatan perjanjian kinerja dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan penyusunan indikator kinerja individu masing – masing pegawai.
2. Melakukan komunikasi yang intens dengan PDM untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mengawal dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi lapangan dalam implementasi kebijakan pusat.
3. Menjalin komunikasi yang intens dan bekerjasama serta bersinergi dengan para *stakeholder* di seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya melalui kegiatan rapat bulanan *Project Management Officer* (PMO) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Melakukan advokasi dan pendampingan pada pemda untuk menggali akar masalah yang dihadapi di lapangan.
5. Peningkatan kualitas SDM SAKIP melalui Peningkatan kualitas tim SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairullah

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

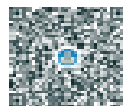
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

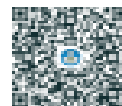
Samarinda, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Iwan Syahril



Khairullah



Catatan:

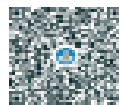
1. DITTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.151.121.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 10.569.649.000
		TOTAL	Rp. 30.720.770.000

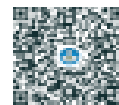
Samarinda, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Iwan Syahril



Khairullah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	84

2. Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

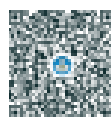
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 13 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Iwan Syahril



Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr

Target Kinerja

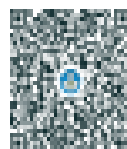
#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 9.389.848.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 26.446.717.000
		TOTAL	Rp. 35.836.565.000

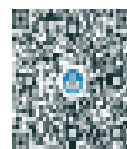
Samarinda, 13 Desember 2023

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Iwan Syahril



Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd

3. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023

Uraian Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target renstra 2024	% Capaian terhadap renstra 2024
				Target	Realisasi	% Pencapaian		
1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen	1.1	Persentase satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	17,98 %	1,69%	1.7 %	87,7 %	3,92 %	43,4 %
	1.2	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	29,69%	30 %	100 %	333%	3525 %	25,71%
2. Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur	78.85 (BB)	84 (A)	86,10. (A)	100%	A	A
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Timur	99,09 %	84	93,58	111%	84	84

Capaian Kinerja Sasaran (Output) BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Anggaran	Realisasi 2022	Target Kinerja 2023	Anggaran	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen	1.1 Satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat pembelajarannya	0,98	Rp400.701571	100 %	1,96	Rp8.330.690.000	99,35%	3,92
	1.2 Persentase Provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya ((dikdas dan dikmen)	29.69%	5.536.178.187	99,95 %	30%	1.059.158.000	99,99	35%
2. Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	78,85 (BB)	374.756.129	99.93%	A (84)	18.896.717.000	99,38	A
	2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Kaltim	99.08	18.253.960.952	99.56%	84	7.550.000.000	99,89	84

4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2.	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	86.10

PERENCANAAN	
No	Catatan
1	Dokumen Perencanaan telah dipublikasikan secara berkala dari tahun 2019 s.d 2023 pada laman/website resmi satker dengan melampirkan dokumen antara lain: 1. Renstra 2. Perjanjian Kinerja 3. Lakin Namun pada tahun 2021 dokumen renstra belum dipublikasikan
2	Berdasarkan Dokumen renstra diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan di Tahun 2023: a. Indikator kinerja Persentase satuan pendidikan (PAUD, Diknas) yang meningkat mutu pembelajarannya mempunyai target di tahun 2023 adalah 1,96% namun pada tahun 2022 telah tercapai hingga 5,25% b. Indikator Kinerja Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) mempunyai target di tahun 2023 adalah 30% namun pada tahun 2022 telah tercapai hingga 55%

PENGUKURAN	
No	Catatan
3	Telah diberikan reward dan punishment kepada pegawai, namun Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment yang menunjukkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment belum ada/belum dilampirkan
4	Belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam melakukan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, misalnya keterkaitan nilai SKP dalam penentuan peningkatan kompetensi pegawai

PELAPORAN	
No	Catatan
5	Informasi yang terdapat dalam laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah digunakan sebagai dasar pelaksanaan aktivitas selanjutnya, namun belum terlihat apakah informasi tersebut diketahui oleh seluruh pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Timur

EVALUASI	
No	Catatan
6	Baru sebagian kecil tim evaluasi internal yang mendapatkan pelatihan SAKIP

PERENCANAAN	
No	Catatan
1	Dokumen renstra tahun 2021 agar segera dipublikasikan pada website resmi BPMP Kalimantan Timur
2	Merevisi target capaian kinerja tahun 2024 yang ditetapkan dalam renstra agar lebih achievable dan realistis

PENGUKURAN	
No	Catatan
3	Melengkapi dokumen pengukuran kinerja berupa pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment yang menunjukkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment
4	Melengkapi dokumen pengukuran kinerja yang dapat menunjukkan bahwa nilai pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam melakukan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, misalnya keterkaitan nilai SKP dalam penentuan peningkatan kompetensi pegawai

PELAPORAN	
No	Catatan
5	Menginformasikan laporan kinerja kepada seluruh pegawai agar dapat diketahui dan dipahami sehingga dapat menjadi acuan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari hari

EVALUASI	
No	Catatan
6	Menyusun analisa kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai secara rutin yang salah satunya memuat peningkatan kompetensi/diklat SAOP terutama untuk tim evaluasi internal yang terlibat

Jakarta, 11 Desember 2023

Inspektur II,



Sutoyo

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 15 Januari 2024
Ketua Tim Reviu



Andrianus Hendro Triatmoko, M.T.
198004182003121004